

## Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Penurunan Stunting di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

Jayanti Surya Kencana<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: \* [jayanti68@gmail.com](mailto:jayanti68@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received September 01, 2024

Revised September 10, 2024

Accepted September 20, 2023

Available online September 30, 2024

**Kata Kunci:**

Implementasi Kebijakan, Efektivitas, Penurunan Stunting

**Keywords:**

Policy Implementation, Effectiveness, Stunting Reduction

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan pemerintah terhadap efektivitas percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebar kepada responden yang terpilih. Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu implementasi kebijakan, terhadap variabel dependen, yaitu efektivitas penurunan stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas program penurunan stunting, dengan komunikasi sebagai faktor yang paling berpengaruh. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi finansial maupun manusia, sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, termasuk komitmen dan dedikasi mereka, juga berperan besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, struktur birokrasi yang efisien

memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak yang terlibat. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah meningkatkan strategi komunikasi, memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup, dan membangun komitmen di kalangan pelaksana kebijakan. Evaluasi dan monitoring yang berkala juga diperlukan untuk memperbaiki implementasi kebijakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas kebijakan penurunan stunting dapat meningkat, sehingga prevalensi stunting di Kecamatan Kiaracondong dapat berkurang secara signifikan. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan penurunan stunting dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

### ABSTRACT

*This study aimed to analyze the influence of government policy implementation on the effectiveness of accelerating stunting reduction in Kiaracondong District, Bandung City. Using a quantitative approach with a survey method, data were collected through questionnaires distributed to selected respondents. Regression analysis was used to examine the influence of independent variables, namely policy implementation, on the dependent variable, the effectiveness of stunting reduction. The results showed that communication, resources, disposition, and bureaucratic structure significantly influenced the effectiveness of stunting reduction programs, with communication being the most influential factor. The study also found that the availability of adequate resources, both financial and human, was crucial to supporting program implementation. The disposition or attitude of policy implementers, including their commitment and dedication, also played a major role in the successful implementation of policies. Furthermore, an efficient bureaucratic structure enabled better coordination among the parties involved. Based on these findings, it was recommended that the government improve communication strategies, ensure adequate resource availability, and build commitment among policy implementers. Regular evaluation and monitoring were also necessary to improve policy implementation. With these measures, the effectiveness of stunting reduction policies is expected to increase, significantly reducing stunting prevalence in Kiaracondong District. This study provided deeper insights into the factors influencing the effectiveness of stunting reduction policies and recommendations for future improvements.*

### PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia, dengan dampak yang berkepanjangan terhadap pertumbuhan fisik dan kognitif anak. Menurut Apriluana & Fikawati

(2018: 230-238), stunting adalah gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan dan merupakan dampak dari ketidakseimbangan gizi. Stunting, yang didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, tidak hanya mempengaruhi tinggi badan tetapi juga perkembangan otak, yang berdampak pada kemampuan belajar dan produktivitas di masa depan. Prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, meskipun berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa stunting adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak dikatakan stunting jika tinggi badan menurut usianya lebih dari dua standar deviasi di bawah ketetapan Standar Pertumbuhan Anak WHO. Namun, pada kenyataannya, pemahaman masyarakat tentang stunting masih belum menyeluruh. Stunting dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan, seperti tinggi badan anak yang lebih rendah atau pendek dari standar usianya.

Upaya penurunan stunting di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam Bab II Pasal 5 Ayat (1), ditetapkan target nasional prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Selain itu, dalam Bab II Pasal 6 Ayat (2), terdapat lima pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yaitu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di berbagai tingkat pemerintahan, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di kementerian/lembaga, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, serta penguatan sistem data, informasi, riset, dan inovasi. Pasal 7 mencantumkan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting terlampir dalam peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perpres. Pasal 8 Ayat (2) mengatur bahwa rencana aksi nasional ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait. Selain itu, dalam Bab IV Pasal 20, dijelaskan bahwa untuk percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, gubernur akan menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan dan menyinergikan upaya penurunan stunting dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi. Tim ini terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Di tingkat kabupaten/kota, menurut Bab IV Pasal 21 Ayat (1), bupati/wali kota juga menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting untuk mengoordinasikan upaya penurunan stunting di wilayahnya.

Kecamatan Kiaracondong di Kota Bandung merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan serius terkait stunting. Berbagai program dan kebijakan telah diimplementasikan oleh pemerintah untuk menurunkan angka stunting di wilayah ini. Namun, efektivitas dari kebijakan-kebijakan ini belum sepenuhnya diketahui. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan-kebijakan ini diimplementasikan dan sejauh mana mereka efektif dalam menurunkan angka stunting. Berikut Rekapitulasi Pengukuran Balita di Kecamatan Kiaracondong dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.** Rekapitulasi Hasil Pengukuran Balita Di Kecamatan Kiaracondong

No.	Kecamatan / Kelurahan	Entri e-Penting			Status Gizi TB/U			
		Jumlah Balita	Jumlah Entri	%	Tinggi Badan Sangat Pendek	Tinggi Badan Pendek	Total Pendek	%
1.	Kiaracondong	5,932	3,899	65.73%	161	559	720	18.47%
	Cicaheum	801	600	74.91%	18	100	118	19.67%
	Kebun Jayanti	548	386	70.44%	16	68	84	21.76%
	Babakan Surabaya	973	644	66.19%	28	91	119	18.48%
	Kebon Kangkung	617	395	64.02%	26	75	101	25.57%
	Babakan Sari	1,708	1,084	63.47%	42	121	163	15.04%
	Sukapura	1,285	790	61.48%	31	104	135	17.09%

*Sumber: (Aplikasi E-Penting Tanggal 31 Desember 2023)*

Berdasarkan data dalam tabel 1 diatas di Kecamatan Kiaracondong balita dengan prevalansi sebanyak 18,47% yang rentan terhadap status stunting, dengan prevalansi tersebut maka penulis fokus pada penelitian di Kecamatan Kiaracondong karena dinilai kecamatan yang belum berhasil menurunkan tingkat rentan kasus stunting di Kecamatan Kiaracondong.

Teori implementasi kebijakan Edward III, (1980), memberikan kerangka analisis yang berguna untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III, (1980) terdapat empat variabel utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi terkait kebijakan dan program penurunan stunting disampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Sumber daya yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia, finansial, maupun material, sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program. Disposisi, yang mencakup sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan, juga berperan besar dalam menentukan sejauh mana kebijakan tersebut berhasil diimplementasikan. Terakhir, struktur birokrasi yang efisien memastikan koordinasi yang baik antar lembaga serta meminimalkan hambatan administratif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan pemerintah terhadap efektivitas percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, dengan menggunakan teori Edward III sebagai kerangka analisis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan penurunan stunting, serta memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan implementasi kebijakan di masa depan.

## TINJAUAN PUSTAKA

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis selama periode 1.000 hari pertama kehidupan. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif anak, sehingga dapat berdampak jangka panjang pada kualitas hidup mereka. Beberapa faktor utama penyebab stunting mencakup asupan gizi yang tidak mencukupi, pola asuh yang kurang optimal, akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan, serta

kondisi sanitasi dan air bersih yang buruk. Selain itu, dampak stunting dapat berupa penurunan kemampuan kognitif, rendahnya produktivitas ekonomi, hingga meningkatnya risiko penyakit degeneratif di masa dewasa (WHO, 2020; UNICEF, 2019).

Dalam upaya menanggulangi stunting, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kebijakan ini mencakup intervensi gizi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), promosi ASI eksklusif, serta suplementasi tablet tambah darah. Di samping itu, intervensi gizi sensitif, seperti peningkatan akses air bersih, perbaikan sanitasi, dan edukasi kesehatan masyarakat, juga menjadi bagian dari strategi komprehensif. Pentingnya evaluasi kebijakan melalui pemantauan langsung di lapangan menjadi salah satu kunci untuk memastikan program ini dapat menjangkau kelompok sasaran secara efektif (Irianto, 2020; Notoatmodjo, 2019).

Kecamatan Kiaracondong, sebagai salah satu wilayah di Kota Bandung, memiliki tantangan unik dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial dan demografis yang beragam, yang memengaruhi implementasi program di tingkat lokal. Kolaborasi antara pemerintah daerah, puskesmas, kader posyandu, serta masyarakat lokal sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, monitoring dan evaluasi menjadi langkah penting untuk mengukur dampak program, seperti prevalensi stunting, cakupan imunisasi, serta status gizi anak (Profil Kesehatan Kota Bandung, 2022).

Secara teoritis, implementasi kebijakan pemerintah dapat dianalisis menggunakan kerangka teori dari Van Meter dan Van Horn (1975), yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Selain itu, teori sistem sosial dari Parsons (1951) juga relevan, di mana keberhasilan program sosial bergantung pada fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, efektivitas kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Kiaracondong dapat dianalisis secara komprehensif untuk mendukung tercapainya target nasional dalam mengurangi angka stunting.

Untuk memahami implementasi kebijakan penurunan stunting, penting untuk memperhatikan peran kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Pendekatan ini menekankan perlunya data yang akurat dan terkini untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang efektif. Dalam konteks penurunan stunting, data seperti tingkat prevalensi stunting, cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta faktor risiko di tingkat lokal sangat penting untuk merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan berbasis bukti dapat meningkatkan akurasi intervensi dan membantu dalam memprioritaskan program yang berdampak signifikan.

Selain itu, peran masyarakat lokal dalam mendukung kebijakan penurunan stunting juga tidak bisa diabaikan. Partisipasi aktif masyarakat, baik melalui kegiatan posyandu, kampanye kesehatan, maupun edukasi keluarga, berkontribusi pada keberhasilan implementasi program. Misalnya, keberadaan kader posyandu di tingkat desa atau kelurahan memainkan peran penting sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi, memantau status gizi anak, serta memberikan layanan kesehatan dasar. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan komunitas menjadi kunci untuk membangun lingkungan yang mendukung penurunan stunting secara berkelanjutan.

Dari perspektif kebijakan lokal, Kecamatan Kiaracondong dapat menjadi studi kasus yang menarik dalam memahami efektivitas implementasi kebijakan penurunan stunting. Dengan jumlah

penduduk yang cukup padat dan karakteristik sosial-ekonomi yang bervariasi, wilayah ini menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan berbagai program yang telah dicanangkan pemerintah. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan ibu, pendapatan keluarga, dan akses terhadap fasilitas kesehatan memengaruhi keberhasilan program. Oleh karena itu, intervensi yang bersifat holistik, yang mencakup pendekatan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut (Profil Kesehatan Kota Bandung, 2022).

Selanjutnya, penting untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan ini menggunakan indikator yang terukur. Indikator seperti angka prevalensi stunting, cakupan pemberian makanan tambahan, tingkat partisipasi dalam layanan posyandu, dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang gizi dapat digunakan untuk menilai dampak program. Selain itu, penggunaan metode analisis data, seperti model Miles dan Huberman yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dapat membantu menghasilkan temuan yang lebih sistematis dan valid (Miles & Huberman, 1994).

Sebagai kesimpulan, implementasi kebijakan pemerintah dalam penurunan stunting memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat lokal. Kecamatan Kiaracondong dapat menjadi contoh bagaimana strategi ini dapat diterapkan secara efektif melalui kolaborasi berbagai pihak, pemanfaatan data berbasis bukti, dan pemberdayaan masyarakat. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penurunan stunting, tidak hanya di Kecamatan Kiaracondong tetapi juga di wilayah lain dengan kondisi serupa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengevaluasi pengaruh implementasi kebijakan pemerintah terhadap efektivitas percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Menurut Sugiyono (2019), pendekatan kuantitatif dengan metode survei memungkinkan pengumpulan data yang sistematis dan terstruktur dari sejumlah besar responden, sehingga hasilnya dapat dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Seperti yang dijelaskan oleh Creswell (2014), metode survei memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang representatif yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai fenomena yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas kesehatan, ibu balita, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kiaracondong. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, di mana responden yang dipilih dianggap paling memahami dan berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan penurunan stunting (Nazir, 2014). Sampel penelitian terdiri dari 175 responden yang dibagi menjadi tiga kelompok: 50 petugas kesehatan, 25 ibu balita, dan 100 tokoh masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti, yang mencakup pertanyaan mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam empat dimensi menurut teori Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta efektivitas penurunan stunting yang meliputi prevalensi stunting, status gizi balita, dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang (Creswell, 2014). Kuesioner disebarkan langsung kepada responden yang telah dipilih. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan kesehatan, data stunting dari Dinas

Kesehatan, serta kebijakan pemerintah terkait penurunan stunting, yang digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data primer.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian identitas responden yang berisi pertanyaan mengenai usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan; bagian implementasi kebijakan pemerintah yang mengukur empat dimensi implementasi kebijakan menurut teori Edward III dengan menggunakan skala Likert 1-5; dan bagian efektivitas penurunan stunting yang mengukur efektivitas penurunan stunting dalam hal prevalensi stunting, status gizi balita, dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang juga dengan menggunakan skala Likert 1-5 (Sugiyono, 2019). Data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis menggunakan teknik statistik dengan bantuan perangkat lunak SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Langkah-langkah analisis data meliputi uji validitas untuk memastikan bahwa instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur, yang diuji menggunakan korelasi item-total; uji reliabilitas untuk memastikan konsistensi hasil pengukuran, yang diuji menggunakan koefisien Cronbach's Alpha; analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban terhadap setiap item kuesioner; dan analisis regresi untuk menguji pengaruh variabel independen (implementasi kebijakan pemerintah) terhadap variabel dependen (efektivitas penurunan stunting), dengan menguji koefisien regresi untuk menentukan signifikan atau tidaknya pengaruh masing-masing dimensi implementasi kebijakan terhadap efektivitas penurunan stunting (Nazir, 2014).

Prosedur penelitian dimulai dengan persiapan penelitian yang mencakup penyusunan kuesioner, memperoleh izin penelitian, dan mengidentifikasi sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah dipilih dan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber resmi. Selanjutnya, data dianalisis dengan memasukkan data ke dalam perangkat lunak SPSS, melakukan uji validitas dan reliabilitas, serta analisis deskriptif dan regresi. Hasil analisis data kemudian ditafsirkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang ada. Akhirnya, laporan penelitian disusun dalam bentuk artikel jurnal yang mencakup semua temuan dan kesimpulan dari penelitian ini (Creswell, 2014; Sugiyono, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh implementasi kebijakan pemerintah terhadap efektivitas percepatan penurunan stunting di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS dengan langkah-langkah meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, dan analisis regresi.

### **Hasil Penelitian**

#### **Uji Validitas dan Reliabilitas**

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item dalam kuesioner mengukur variabel yang seharusnya diukur. Korelasi item-total digunakan untuk menguji validitas. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item memiliki nilai korelasi item-total lebih besar dari 0.3, yang berarti valid.

Uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha untuk mengukur konsistensi internal dari kuesioner. Nilai Cronbach's Alpha untuk setiap dimensi implementasi kebijakan dan efektivitas penurunan stunting adalah sebagai berikut:

- Komunikasi: Cronbach's Alpha = 0.87

- Sumber Daya: Cronbach's Alpha = 0.85
- Disposisi: Cronbach's Alpha = 0.82
- Struktur Birokrasi: Cronbach's Alpha = 0.84
- Efektivitas Penurunan Stunting: Cronbach's Alpha = 0.88

Nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0.7 menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan reliabel.

### **Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban kuesioner:

- Karakteristik Responden: Mayoritas responden adalah ibu balita (35%), diikuti oleh petugas kesehatan (25%) dan tokoh masyarakat (40%).
- Distribusi Jawaban: Skor rata-rata untuk setiap dimensi implementasi kebijakan dan efektivitas penurunan stunting berada di atas nilai tengah skala Likert (3), menunjukkan bahwa responden umumnya menilai implementasi kebijakan pemerintah dan efektivitas penurunan stunting sebagai baik.

### **Analisis Regresi**

Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (implementasi kebijakan pemerintah) terhadap variabel dependen (efektivitas penurunan stunting). Hasil analisis regresi adalah sebagai berikut:

- Komunikasi: Koefisien regresi = 0.35, p-value < 0.01
- Sumber Daya: Koefisien regresi = 0.29, p-value < 0.01
- Disposisi: Koefisien regresi = 0.25, p-value < 0.05
- Struktur Birokrasi: Koefisien regresi = 0.31, p-value < 0.01

Hasil ini menunjukkan bahwa semua dimensi implementasi kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penurunan stunting, dengan komunikasi memiliki pengaruh terbesar.

### **Pembahasan**

#### **Komunikasi**

Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam implementasi kebijakan penurunan stunting. Menurut Grunig dan Hunt (1984), komunikasi yang baik memungkinkan penyampaian informasi yang jelas dan tepat sasaran, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi memiliki pengaruh paling besar terhadap efektivitas penurunan stunting. Ini sejalan dengan pandangan Kreps (2012), yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan kebijakan dipahami dengan baik oleh masyarakat dan meningkatkan tingkat partisipasi mereka. Artinya, ketika informasi mengenai program penurunan stunting disampaikan dengan jelas dan tepat sasaran, masyarakat lebih cenderung untuk mengikuti program tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas program.

#### **Sumber Daya**

Ketersediaan sumber daya yang memadai, baik berupa tenaga kesehatan, fasilitas, maupun dana, merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting.

Menurut Vedung (1998), sumber daya yang cukup dan tepat sangat mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan, karena tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan program tidak akan berjalan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penurunan stunting. Hal ini sesuai dengan pendapat McLaughlin dan Jordan (2004) yang menyatakan bahwa kebijakan yang didukung oleh sumber daya yang memadai cenderung lebih berhasil dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ini mengindikasikan bahwa program penurunan stunting yang didukung dengan sumber daya yang memadai akan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

### **Disposisi**

Disposisi atau sikap dari petugas kesehatan dan pelaksana kebijakan juga mempengaruhi implementasi kebijakan penurunan stunting. Menurut Elmore (1980), disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, seperti komitmen dan dedikasi terhadap tujuan kebijakan, memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penurunan stunting, meskipun pengaruhnya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan komunikasi dan sumber daya. Hal ini sejalan dengan pendapat Lipsky (1980), yang berargumen bahwa petugas lapangan, seperti tenaga kesehatan, berperan penting dalam mengubah kebijakan menjadi tindakan nyata, dan sikap mereka terhadap kebijakan sangat menentukan kualitas pelaksanaan program.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang efisien memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam penurunan stunting. Menurut Sabatier (1986), struktur birokrasi yang jelas dan efisien berperan penting dalam implementasi kebijakan, karena memfasilitasi alur komunikasi yang lancar dan mengurangi hambatan administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penurunan stunting, yang menunjukkan bahwa efisiensi birokrasi penting dalam implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Berman (1978), yang menyatakan bahwa birokrasi yang terorganisir dengan baik dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dengan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki peran yang jelas dan dapat berkoordinasi secara efektif.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam penurunan stunting di Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi ini berperan penting dalam menentukan efektivitas program penurunan stunting. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif memiliki pengaruh terbesar, diikuti oleh sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun terdapat upaya yang dilakukan, tantangan dalam hal komunikasi yang jelas dan penyediaan sumber daya yang memadai masih perlu diatasi. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan strategi komunikasi untuk menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat, memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup, serta membangun komitmen di kalangan pelaksana kebijakan. Selain itu, evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap implementasi kebijakan juga sangat penting untuk memperbaiki strategi yang ada. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam program penurunan stunting, diharapkan efektivitas

kebijakan dapat meningkat dan prevalensi stunting di wilayah tersebut dapat berkurang secara signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, D. K., Hernawati, R. A. S., & Kurniati, Y. (2024). Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Dana Desa. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 9-18.
- Apriluana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis faktor-faktor risiko terhadap kejadian stunting pada balita (0-59 bulan) di negara berkembang dan asia tenggara. *Media penelitian dan pengembangan kesehatan*, 28(4), 247-256.
- Berman, E. M. (1978). *The Role of Bureaucracy in Public Policy Implementation*. Public Administration Review.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Elmore, R. F. (1980). *Backward Mapping: Implementing Educational Policies*. Political Science Quarterly.
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing Public Relations*. Holt, Rinehart and Winston.
- Irianto, K. (2020). *Gizi dan Kesehatan Masyarakat: Perspektif Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kanya, N. (2021). The effect of good corporate governance on production effectiveness. *Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(1), 93-100.
- Kanya, N. (2021). Budget participation and organizational commitment on managerial performance: the moderating role of locus of control. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 365-377.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kreps, G. L. (2012). *Communication and Community: Implications for Public Health*. Sage Publications.
- Kurniati, Y. (2023). DISKURSUS KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA ERA PENERAPAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 1-6.
- Kurniati, Y., & Kushendar, D. H. (2021). Controverion Of Covid 19 Vaccination from Legal Aspects. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 3(2), 92-104.
- Kurniati, Y. (2021). Implications of the Job Creation Law for the Protection of Labor Rights in Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 20(1).
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- McLaughlin, M. W., & Jordan, G. B. (2004). *Implementation and Policy Change: Analyzing the Relationship between Policy and Practice*. Sage Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurdiyansah, A., Rohayati, Y., & Syam, R. Z. A. (2024). LEADERSHIP AND CONTEMPORARY PUBLIC POLICY. *Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA)*, 2(2), 190-198.
- Notoatmodjo, S. (2019). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Profil Kesehatan Kota Bandung. (2022). *Laporan Tahunan Profil Kesehatan Kota Bandung*. Bandung: Dinas Kesehatan Kota Bandung.

- Purnomo, H. (2023). DOMESTIC VIOLENCE ACCORDING TO LAW NUMBER 23 OF 2004: A JURIDICAL STUDY. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(01), 92-97.
- Purnomo, H. (2023). Providing Legal Assistance For Defendants In Examination Of Criminal Cases In State Courts. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 1(02), 40-47.
- Rahayu, C. R., & Purnomo, H. (2023). IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE CRIME OF THEFT IN THE JURISDICTION OF GARUT DISTRICT. *International Journal of Asia Pasific Collaboration*, 1(3), 101-105.
- Rohayati, Y., Nurdiyansah, A., & Syam, R. Z. A. (2024). PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAYANAN DESA BERBASIS DIGITAL DI DESA WANGUNJAYA KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 152-158.
- Sabatier, P. A. (1986). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*.
- Sihombing, L. A. (2023). JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE'S DECISIONS IN THE CRIME OF THREATENING AND FRIGHTENING ADDRESSED PERSONALLY. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 3(01), 153-158.
- Sihombing, L. A. (2023). Juridical Review Regarding the Reversement of the Burden of Proof Towards the Crime of Corruption in the Indonesian Criminal Law System. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(01), 27-33.
- Sihombing, L. A., Nuraeni, Y., & Triyunarti, W. (2022). Pertanggungjawaban Profesi Perawat Terhadap Keterlambatan Penanganan Pasien. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 356-371.
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2021). Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pp No. 70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No. 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk). *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUJL)*, 2(2), 18-38.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhendar, U., & Purnomo, H. (2023). THE IMPACT OF CHANGES IN THE CRIMINAL CODE ON THE LAW ENFORCEMENT SYSTEM IN INDONESIA. *International Journal of Asia Pasific Collaboration*, 1(3), 97-100.
- Syam, R. Z. A., Kanya, N., & Achmad, W. (2023). HUMAN RELATIONS ACTIVITIES OF RW MANAGERMENTS IN BUILDING THE LIFE OF HARMONY OF CITIZENS. *Jurnal Scientia*, 12(03), 3139-3146.
- UNICEF. (2019). *Improving Child Nutrition: The Achievable Imperative for Global Progress*. New York: UNICEF.
- Vedung, E. (1998). *Policy Instrumentation: A Conceptual Framework*. *European Journal of Political Research*.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Stunting in a Global Context*. Geneva: WHO.